

## STRATEGI KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH) INDONESIA: DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

<sup>1</sup>Dewi Ayu Marchela Putri, <sup>2</sup> Langgeng Rachmatullah Putra

<sup>1,2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Correspondent author: [dewiayu310304@gmail.com](mailto:dewiayu310304@gmail.com)

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

### Abstract

The purpose of this research is to understand and discuss Indonesia's green growth strategies in facing global challenges related to climate change. The main focus of this study lies in policy adaptation and practices that support climate change mitigation and adaptation, taking into account both local and global contexts. Through secondary data analysis, this article identifies the main challenges faced by Indonesia, such as increasing greenhouse gas emissions and deforestation. Additionally, the article evaluates government and private sector initiatives in promoting renewable energy, natural resource conservation, and enhancing community adaptation capacity. Research findings indicate that the success of Indonesia's green growth strategy heavily relies on multisectoral collaboration, increased public awareness, and strong political commitment. The conclusion of this article emphasizes the need for a holistic and inclusive approach in designing policies and implementing them to achieve sustainable economic growth and climate resilience.

**Keywords:** Climate Change; Green Growth; GGGI; Policy

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami strategi pertumbuhan hijau Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim. Fokus utama penelitian ini terletak pada adaptasi kebijakan dan praktik yang mendukung mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global. Melalui analisis data sekunder, artikel ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Selain itu, artikel ini mengevaluasi inisiatif pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pertumbuhan hijau Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi multisektoral, peningkatan kesadaran publik, dan komitmen politik yang kuat. Kesimpulan artikel ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan inklusif dalam merancang kebijakan serta implementasinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan iklim.

**Kata Kunci:** GGGI; Kebijakan; Pertumbuhan Hijau; Perubahan Iklim

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu masalah terbesar di dunia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk menangani masalah ini, negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, telah mengadopsi strategi dan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan hijau (*green growth*) sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah pada lingkungan. Kebijakan *green growth* merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju maupun dan berkembang untuk

mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi secara bisnis as usual yang diakibatkan oleh proyek-proyek industri dalam jangka panjang. Proyek industri menggunakan sejumlah besar unit industri dari zat-zat tertentu yang berdampak terhadap lingkungan, jumlah investasi yang terlalu besar dalam bidang sumber daya alam jika tidak disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan terjadinya peristiwa ekologi yang akan mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan lingkungan. Hal ini pasti akan menyebabkan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yang bertujuan untuk menurunkan persentase emisi karbon (LM Syuhada Ridzky et al., 2023)

Menurut para ekonom, istilah “pertumbuhan hijau” (*Green growth*) muncul pada awal tahun 2000-an dan merupakan konsep baru dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah dasar pertumbuhan hijau. Berbagai organisasi internasional seperti UNEP, Bank Dunia, IEA dan pertemuan negara-negara G8 dan G20. Telah menyarankan agar pertumbuhan hijau menjadi kebijakan nasional negara dengan alasan bahwa pertumbuhan hijau dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 2011a), penggunaan sumber daya alam yang efektif, pengurangan dampak lingkungan dan populasi, dan adaptasi terhadap bencana (Bank Dunia, 2012a). Selain itu, pertumbuhan hijau menekankan kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan untuk mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial (UNESCAP, 2010). Pertumbuhan hijau juga penting dalam menangani dampak perubahan iklim karena terkait erat dengan konsep ekonomi hijau, yang bertujuan untuk menstabilkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011) (Harisman, 2012)

Isu Pertumbuhan hijau (*Green Growth*) terus menarik perhatian banyak negara. Persoalan ini kemudian ditegaskan melalui kesepakatan internasional pada KTT Rio+20 Summit Brazil (Rio+20) tahun 2012. Pertemuan ini memiliki tiga tujuan; dimulai dengan memperbarui komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi kemajuan dan kesenjangan dalam upaya implementasi pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan yang muncul (Leggett & Carter, 2012). Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam Rio+20 development (IFSD). (MEJILLÓN GONZÁLEZ YURI LISBETH TUTOR.; 2022). Lebih lanjut, pertumbuhan hijau (*green growth*) dalam agenda G20 menciptakan strategi yang dapat digunakan oleh negara-negara G20 dalam menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau (*green growth*), seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral, pada pertemuan tanggal 25 dan 26 Februari 2012, di Mexico City, meminta OECD, Bank Dunia dan lembaga terkait di PBB untuk menyiapkan laporan yang menyajikan berbagai pilihan bagi

negara-negara G20 tentang bagaimana mengintegrasikan kebijakan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam program reformasi struktural. Pilihan kebijakan yang disiapkan harus sesuai dengan kondisi dan tingkat pembangunan masing-masing negara. Lebih lanjut, para menteri dan gubernur juga berjanji untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini dan secara sukarela menginformasikan tindakan masing-masing negara untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Laporan ini memberikan serangkaian pilihan kebijakan bagi negara-negara yang dapat digunakan untuk merancang strategi pertumbuhan hijau.

OECD menyarankan lima langkah untuk menerapkan pertumbuhan hijau: pertama, memenuhi kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan hijau. Bagaimana perekonomian setiap negara berkembang sangat memengaruhi kebutuhan model pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam model pertumbuhan hijau, sektor ekonomi dianggap berpotensi melaksanakan pertumbuhan hijau. Kedua, Menghilangkan penghambat pertumbuhan hijau. Jika hambatan seperti sistem pajak yang tidak mengarah pada kelestarian lingkungan dihilangkan dan insentif diberikan untuk Pencapaian pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif jika hambatan seperti sistem pajak yang tidak mengarah pada kelestarian lingkungan dihilangkan, dan diberikan insentif bagi pembanguan yang berfokus pada ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Ketiga, pendekatan politik untuk menerapkan pertumbuhan hijau. Untuk mencapai keberhasilan pertumbuhan hijau, peran politik sangat penting; hal ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan model pertumbuhan. Keempat, menilai indikator pertumbuhan hijau. Indikator pertumbuhan hijau ini digunakan untuk mengawasi dan mengukur keberhasilan model pertumbuhan nasional. Akibatnya, penciptaan indikator pertumbuhan hijau sangat penting untuk strategi pelaksanaan pertumbuhan hijau. Kelima, menerapkan gagasan pertumbuhan hijau secara konsisten. Setelah langkah-langkah dilakukan, pertumbuhan hijau yang terarah harus dilakukan secara berkelanjutan.(Harisman, 2012)

Oleh karena itu, bertolak dari urgensi penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji terkait kebijakan dan strategi apa saja yang diterapkan Indonesia sebagai salah satu dari 193 negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam pembangunan Rio+20 untuk menjawab tantangan global, seperti memenuhi komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang didasarkan pada review literatur. Menurut Hasibuan, literatur review berisi uraian tentang teori, hasil, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Tujuan dari uraian literatur review ini adalah membuat kerangka pemikiran yang jelas untuk memecahkan

masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, buku, internet, berita dan sumber lainnya. Peneliti menggunakan analisis dokumen, Analisis Dokumen adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk menelusuri dan menganalisis data teks dari dokumen, ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena tertentu atau menjelaskan tindakan praktis(Nurdin & Hartati, 2019)(Nilamsari, 2014)(LM Syuhada Ridzky et al., 2023). Sehingga dapat digunakan sebagai landasan yang kuat untuk isi atau pembahasan, diambil beberapa kesimpulan, dan ditelaah secara rinci untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan harapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lanskap Kebijakan Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*) di Indonesia

Lanskap kebijakan dimulai dengan mengidentifikasi kebijakan terkait pertumbuhan hijau (*green growth*) di Indonesia. Secara umum terdapat 2 (dua) kategori dalam lanskap kebijakan, yang pertama adalah payung kebijakan, yaitu kebijakan ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia, dalam bentuk undang-undang. Selain itu, sejumlah perjanjian internasional yang dibentuk menjadi undang-undang dan kemudian diadopsi dengan cara yang lebih berorientasi pada implementasi. Kedua, kebijakan 'turunan', yaitu kebijakan operasional pengesahan perjanjian internasional, di tingkat pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah dan di tingkat Kementerian teknis menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri. Masih banyak lagi jenis kebijakan baik berupa Keputusan Presiden maupun Peraturan Presiden yang setara dengan Peraturan Pemerintah. Namun karena bersifat khusus dan harus segera dilaksanakan, maka diterbitkan Keputusan Presiden atau Perpres sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (*Analisis Kebijakan Dan Pendanaan Untuk Ketahanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia, 2023*)

Selanjutnya, Presiden Indonesia telah menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai koordinator teknis program pertumbuhan hijau (*Green Growth Program*). Selanjutnya, BAPPENAS juga berfungsi sebagai focal point untuk Program Pertumbuhan Hijau, yang dilaksanakan bersama dengan *Global Green Growth Institute (GGGI)*. Untuk lanskap kebijakan pertumbuhan hijau di Indonesia mencakup payung kebijakan dan kebijakan strategis oleh BAPPENAS, yaitu:

#### Payung kebijakan (kebijakan makro) dari pertumbuhan hijau

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2020-2024
- 2) Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014
- 3) UU PPLH No 32 Tahun 2009

- 4) Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

**Kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh BAPPENAS:**

- 1) Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN): RTRWN di Indonesia terdiri dari tiga arah kebijakan yang berfokus pada pengelolaan lanskap terintegrasi;
- 2) Kebijakan Satu Peta: Kebijakan ini perlu ditingkatkan untuk mendukung mekanisme bagi-pakai data yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan antar pemangku kepentingan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak dalam mengelola lanskap terintegrasi;
- 3) Kebijakan Ekonomi Hijau: Di Indonesia, kebijakan ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan adalah tiga bidang utama yang sangat penting untuk mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia;
- 4) Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia: Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia atau (*Green Growth Policy Review/GGPR*) telah dirilis oleh KLHK pada Tahun 2019. Dokumen ini memeriksa kerangka kebijakan untuk pertumbuhan hijau di Indonesia dan memberikan 49 saran untuk meningkatkan efektivitas, kohesi, dan efisiensi kebijakan.

**Strategi Indonesia dalam beberapa sektor**

**a) Model Sektor Ekonomi Indonesia dalam mendukung *Green Growth***

untuk mendukung kebijakan pertumbuhan hijau (*green growth policy*), Indonesia menerapkan sejumlah strategi yang diusulkan oleh OECD. Salah satu strategi tersebut mencakup kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan hijau. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan GGGI (*Global Green Growth Institute*), sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan untuk mendukung dan mempromosikan model pertumbuhan ekonomi yang disebut "pertumbuhan hijau", yang mencakup elemen utama kinerja ekonomi seperti penciptaan inklusi sosial dan kelestarian lingkungan, serta pengentasan kemiskinan, lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. GGGI bekerja dengan negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas dan berkolaborasi dalam proyek dan kebijakan pertumbuhan ramah lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara, organisasi multilateral, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk membantu membangun perekonomian dengan pertumbuhan lebih tinggi yang menggunakan sumber daya alam secara lebih efisien dan

berkelanjutan, mengurangi emisi karbon intensif, dan menjadi lebih berketahanan terhadap perubahan iklim (Program, 2023)

Di Indonesia, Program Pertumbuhan Hijau (GGP), yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2013, dilaksanakan oleh pemerintah dan GGGI. Dan saat ini memasuki fase 3 (2021-2025), GGGI sendiri membantu pemerintah mengintegrasikan prinsip pertumbuhan hijau ke industri, daerah, dan negara. serta mengembangkan kebijakan dan instrumen ekonomi yang inovatif untuk mengurangi risiko investasi dan menarik aliran modal ke empat bidang tertentu: bentang alam berkelanjutan, keuangan dan investasi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan kawasan ekonomi khusus (Sarwanti et al., 2022)

Fase pertama (2013-2015) dari *Green Growth Program (GGP)* difokuskan pada penggabungan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau ke dalam perencanaan ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, serta mempercepat pelaksanaan *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD+)* di Indonesia. Menurut GGP, GGGI telah menunjukkan hasil nyata dengan mendorong penggabungan indikator pertumbuhan hijau, seperti REDD+, ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kalimantan Timur. Di tingkat nasional, GGGI telah membantu menciptakan peta jalan pertumbuhan hijau, di mana REDD+ dan perubahan iklim adalah komponen penting dari perencanaan pertumbuhan hijau. Tujuan kedua (2016-2020) adalah untuk melakukan investasi ramah lingkungan secara komprehensif di sektor-sektor prioritas untuk mengurangi emisi dan menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan produktif, serta membangun sistem yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Secara keseluruhan, GGGI telah berkontribusi pada penyusunan lebih dari lima puluh kebijakan, rencana dan peraturan nasional dan provinsi, serta mendorong komitmen investasi awal senilai lebih dari \$220 juta melalui bentuk pembayaran berbasis kinerja dari FCPF, GCF, dan dana karbon lainnya. Pencapaian ini membantu Pemerintah Indonesia mencapai tujuannya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong investasi dan lapangan kerja yang ramah lingkungan.

Fase ketiga (2021-2025), memfokuskan pada fase kedua untuk mencapai pencapaian penting yang sesuai dengan prioritas Pemerintah. Dengan menggunakan *Folu Net Sink 2030*, GGGI berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan daerah untuk memperkuat komitmen pemerintah untuk menyelaraskan rencana dan pembandaran iklim. Kebijakan yang efektif bertujuan untuk mencegah deforestasi dan degradasi lahan gambut serta menjamin bahwa tidak ada deforestasi, terutama di provinsi dengan wilayah hutan utuh yang luas. Selain itu, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim; deforestasi dan pembakaran lahan gambut merupakan sumber utama



emisi karbon.

Selin itu, GGGI telah mengidentifikasi enam proyek besar biogas terkompresi (CBG) dan masalah yang terkait dengan pelaksanaannya, dengan tujuan meningkatkan investasi dan mendukung pengembangan peraturan CBG bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. seperti ketidaksesuaian dalam peraturan perizinan. GGGI membantu pemerintah dalam mengembangkan Klasifikasi Baku Industri Indonesia No. 35203 sebagai payung untuk proyek produksi, penyimpanan, distribusi, dan komersialisasi CBG. Menunggu penerbitan izin tersebut, pabrik CBG komersial pertama di Indonesia akan dibangun pada kuartal ketiga tahun 2022. GGGI juga mendukung standarisasi CBG, dan membantu komersialisasinya untuk menarik investor ritel. Untuk mendapatkan dana dari *Green Climate Fund* dari tahun 2020 hingga 2022 Kementerian Keuangan telah membuka pendaftaran ide proyek yang didukung oleh GGGI dengan daftar catatan yang mencakup lebih dari 530 juta USD ini mencakup proposal peningkatan efisiensi yang disetujui oleh GCF pada Oktober 2022 dengan anggaran sebesar 248 juta USD.

#### **b) Strategi Indonesia dalam sektor lingkungan**

Indonesia telah menyampaikan dokumen NDC terbarunya, yang serupa dengan dokumen NDC pertama. Dokumen ini berisi proyeksi emisi BAU dan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Kehutanan dan lahan, atau forest and other landuse (FOLU), berkontribusi sebesar 25% (setara dengan 714 juta Tco2E), dan sektor energi berkontribusi sebesar 58% (setara dengan 1,669 juta tCO2e) dari total emii BAU nasional pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia telah berkomitmen kepada UNFCCC dalam NDC-nya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari level *Business as Usual* (BaU) pada tahun 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% melalui dukungan internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan untuk mencapai kondisi net sink di sektor FOLU pada tahun 2030, menurut dokumen *Indonesia's Long-Term Strategy for Climate Resilience and Low Carbon 2050* (Indonesia LTS-LCCR 2050), tujuan ini akan dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gambut, yang akan menyebabkan emisi gas rumah kaca. Diharapkan juga, peningkatan penyerapan hutan sekunder, aforestasi, dan reforestasi akan membantu mencapai tujuan ini. Indonesia membagikan keberhasilannya di bidang kehutanan dan lahan di COP26 Glasgow, yang berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan November 2021. Selain itu, Indonesia memanfaatkan bantuan dan kerja sama internasional dalam transisi energi menuju energi terbarukan dan bersih. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada *World Leader Summit on Forest and Land Use*, keberhasilan di sektor kehutanan dan lahan ini juga merupakan bukti *leading by example*. Pidato tersebut mencakup elemen penting seperti:

- 1) Komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi dengan target pengurangan karbon bersih pada sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.

- 2) Tingkat kebakaran hutan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 82% di tahun 2020, sementara emisi gas rumah kaca dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2015.
- 3) Deforestasi hutan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Ketika tahun lalu dunia kehilangan 12% lebih banyak hutan primer dibandingkan tahun sebelumnya dan banyak negara maju mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam sepanjang sejarah.
- 4) Pentingnya memadukan pertimbangan lingkungan hidup dengan pertimbangan ekonomi dan sosial dalam kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk mengedepankan kemitraan dengan masyarakat sebagaimana diterapkan dalam Program Perhutanan Sosial.
- 5) Keberhasilan ini dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Selama kepemimpinannya di G20, Indonesia mengangkat tiga isu prioritas: arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan ekonomi digital. Pembahasan pembangunan hijau berkelanjutan menjadi topik utama dalam pembahasan Sherpa Track dan Finance Track, sebagai berikut:

1. Dalam Sherpa Track, permasalahan ini dibahas pada:

- a. *Working Group Energy Transitions* yang membahas tentang menjaga akses ke energi; pengembangan teknologi smart dan bersih; dan mendorong pembiayaan energi.
- b. *Working Group Environment and Climate* yang membahas tentang meningkatkan tindakan di darat dan laut untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim; dan meningkatkan mobilitas sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim
- c. *Working Group Energy Transitions* yang membahas tentang koordinasi pencapaian SDGs oleh G20.
- d. *Working Group Anti-Corruption* yang membahas tentang mendorong antikorupsi dalam sumber daya energi hijau.

2. Pada Track Finance, Working Group Sustainable Finance membahas masalah ini terkait pembuatan framework untuk keuangan transisi, membahas instrumen politik yang mendorong keuangan dan investasi untuk kegiatan transisi. (Arifin, 2020)

### **c) Strategi di sektor Ekonomi**

karena beragamnya kegiatan pembangunan hijau, tentunya diperlukan banyak sumber pendanaan dan dukungan finansial. Ada beberapa skema pembiayaan pembangunan hijau untuk Indonesia, yaitu:



- a) Skema pembiayaan sederhana, yang mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E), koperasi, penjaminan kredit daerah, dan BUMDes untuk UMKM, petani kecil, dan nelayan.
- b) Skema pembiayaan yang lebih kompleks, yang mencakup pembiayaan untuk proyek teknologi hijau dan/atau mendukung pertumbuhan hijau berkelanjutan.
- c) Skema pembiayaan investasi, salah satunya adalah platform pembiayaan SDG Indonesia One oleh PT SMI untuk lakukan skema derisking. Sedangkan opsi pendanaan investasi lainnya melibatkan lembaga penjaminan.
- d) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) didanai dengan dana pemerintah atau privat dalam program pembiayaan nasional. Indonesian *Environment Fund* (IEF) diharapkan dapat mendorong pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta melalui CSR, retribusi, filantropi, dan investasi.
- e) Akses ke dana internasional: fasilitas lingkungan dunia (GEF) mencakup *Global Environment Facility* (GEF), *dana perubahan iklim* (GCF), dan *dana adaptasi* (AF) (Arifin, 2020)

## KESIMPULAN

Analisis ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan pertumbuhan hijau (*green growth*) Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, dalam implementasinya mempunyai potensi besar untuk mitigasi perubahan iklim, namun penerapannya masih menghadapi tantangan politik dan sosial untuk mendorong pertumbuhan hijau (*green growth*) atau pembangunan berkelanjutan. Perubahan ini berpotensi mengubah keunggulan komparatif suatu negara, industri, dan kelompok sosial dalam jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang terjadi pada proses transformasi. Dalam jangka pendek, ada kemungkinan biaya dan perselisihan antara tujuan kebijakan karena beberapa elemen transisi. Oleh karena itu, reformasi struktural hijau memerlukan pertimbangan yang cermat tentang biaya dan risiko yang terkait. Ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan rencana. Untuk mencapai tujuan ini, efek yang tidak diinginkan dari tindakan tersebut harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan, seperti bagaimana penggunaan sumber energi terbarukan, seperti biofuel, akan berdampak pada pasar komoditas.

## DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. (2021). Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada FGD dengan topik "Transisi dan Transformasi Ekonomi Hijau, Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", 20 September

*Analisis Kebijakan dan Pendanaan untuk Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia*. (2023).

Arifin, S. (2020). Policy Brief Policy Brief. *Pancanaka*, 1(2), 14.

- Harisman, R. (2012). Pertumbuhan Hijau di G20 dan Strategi Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 1(1), 1–13. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pertumbuhan hijau di G20 dan strategi Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pertumbuhan%20hijau%20di%20G20%20dan%20strategi%20Indonesia.pdf)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia. Bappenas, 39.
- Lestari, D. (2021). Pendanaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rendah Karbon, dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada Diskusi Terbatas dengan topik “Aspek Pendanaan dan Pembiayaan dalam Pembangunan dan Ekonomi Hijau”, 24 September.
- Li, R., & Leung, G. C. K. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. *Energy Reports*, 7, 1712–1719.
- LM Syuhada Ridzky, La Ode Agus Said, & Siti Kadri Yanti Sari. (2023). Genuine Progress Indicators Sebagai Pendekatan Alternatif Menuju Ekonomi Berkelanjutan. *Journal Publicuho*, 6(4), 1362–1373. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283>
- Program, G. G. (2023). *Green Growth Program ( GGP ) in Indonesia*.
- Rahmanto, R.B. (2022). Kebijakan Diplomasi Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Indonesia di Forum Internasional. Presentasi pada Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN), Jakarta, 26 April. *Post Pandemic Economy Recovery*, 1–10.
- San, O. T., Anqi, C., Muhammad, H., & Izah, A. (2022). Research on the Role of Green Innovation , Trade and Energy in Promoting Green Economic Growth. 6(2), 5186–5194
- Sarwanti, A., Fahlevi, A. K. G., Sugraha, A., Putra, F., Andriyana, I., Dwi, L. A., & Amruddin, S. (2022). Strategi Pembangunan Berketahanan Iklim dan Green Growth Program di Indonesia dan di Negara Asia Lainnya. *Post Pandemic Economy Recovery*, 1–10.